



**PERJANJIAN KINERJA  
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Ardiyanto  
Jabatan : Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri, dan Perumahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sally Salamah  
Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sally Salamah  
NIP. 19670420 198703 2 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021  
Pihak Pertama,

Arif Ardiyanto  
NIP. 19661019 198703 1 001

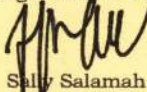
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA KONEKTIVITAS, PARIWISATA,**  
**KAWASAN INDUSTRI, DAN PERUMAHAN**  
**DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	10
	1.2 Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	Persen	15
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	8
	2.2 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	4
3 Meningkatkan Akuntabilitas Badan Usaha	3.1 Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	8
4 Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	4.1 Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Persen	50
5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	5.1 Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Persen	47
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1 Persentase K/L dengan MRI $\geq$ Level 3	Persen	33
	6.2 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Persen	67
	6.3 Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Persen	67
	6.4 Persentase BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	Persen	22,03
	6.5 Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	Persen	3,39
7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan	Indeks Skala 100	75

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan Direktorat	Rp. 1.730.640.000,00
2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp. -
Jumlah	Rp. 1.730.640.000,00

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Deputi Kepala BPKP  
Bidang Akuntan Negara



Saly Salamah  
NIP. 19670420 198703 2 001

Direktur,



Arif Ardiyanto  
NIP. 19661019 198703 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA KONEKTIVITAS, PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, DAN PERUMAHAN**  
**AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN**

NO	KODE TOPIK	SEKTOR/TEMA/TOPIK PENGAWASAN	PERAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata kelola Penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang ada di PT Pos (a.l. meliputi pembuatan danom, pengiriman dana ke masing-masing kantor pos cabang, pengiriman undangan dan proses pendistribusian, dsb)</li> <li>- Ketepatan sasaran (di salurkan kepada KPM sesuai data penerima bantuan), jumlah (jumlah uang yang dibayarkan sesuai jumlah dalam surat perintah), dan waktu penyaluran (waktu penyaluran tidak melebihi yang diatur dalam PKS)</li> <li>- Permasalahan dan hambatan penyaluran terkait PT.Pos</li> <li>- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</li> </ul>	-	√	-	-
2	B.3.d.	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan progres capaian pembangunan api</li> <li>- Utilisasi infrastruktur jalur kereta api</li> <li>- Potensi penghematan biaya pembangunan kereta api</li> <li>- Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan api</li> <li>- Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi api</li> </ul>	-	-	-	√
3	B.3.e.	Pembangunan Bandara	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Bandara oleh BUMN (PT Angkasa Pura)</li> <li>- Jumlah pembangunan bandara oleh BUMN</li> <li>- Ketepatan perencanaan pembangunan bandara</li> <li>- Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan bandara, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi</li> <li>- Konektivitas Infrastruktur pendukung (Aksesibilitas Jalan, Jalan Tol)</li> <li>- Utilisasi pembangunan bandara sesuai peruntukan</li> <li>- Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/ kegiatan</li> <li>- Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi</li> </ul>	-	-	-	√
4	B.3.f.	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan pelabuhan oleh BUMN (PT Pelindo)</li> <li>- Jumlah proyek pembangunan pelabuhan oleh PT Pelindo</li> <li>- Ketepatan perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan</li> <li>- Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi</li> <li>- Konektivitas Infrastruktur pendukung (Aksesibilitas Jalan, Jalan Tol)</li> <li>- Utilisasi pembangunan infrastruktur pelabuhan sesuai peruntukan</li> <li>- Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/ kegiatan</li> <li>- Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/implementasi</li> </ul>	-	-	-	√

NO	KODE TOPIK	SEKTOR/TEMA/TOPIK PENGAWASAN	PERAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
5	C.1.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simpulan Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran pada masing-masing K/L terkait</li> <li>- Simpulan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran pada masing-masing K/L terkait</li> <li>- Permasalahan dalam penyusunan Perencanaan dan pengalokasin anggaran pada masing-masing K/L terkait</li> <li>- Rekomendasi perbaikan atas proses Perencanaan dan Penganggaran pada masing-masing K/L terkaitpada masing-masing K/L terkait</li> <li>- anggaran yang dialokasikan pada kegiatan yang mengungkit/mendorong pertumbuhan ekonomi (jenis kegiatan dan besarnya alokasi anggaran) pada masing-masing K/L terkait</li> </ul>	-	√	-	-
6	C.1.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa K/L	Kontributor	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis postur belanja K/L</li> <li>- Analisis rencana penarikan dana/disbursement plan dan proyeksi serapan belanja per triwulan tahun 2022</li> <li>- Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ</li> <li>- Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ</li> <li>- Rekomendasi percepatan penyerapan</li> </ul> <p>Triwulan II dan III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis ketepatan waktu serapan belanja per triwulan II dan III dengan proyeksinya/RPD</li> <li>- Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ</li> <li>- Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ</li> <li>- Rekomendasi percepatan penyerapan</li> </ul> <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis tren penyerapan pendapatan dan belanja</li> <li>- Analisis kontribusi belanja pada pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Rekomendasi perbaikan pelaksanaan belanja dan PBJ K/L</li> </ul>	√	√	√	√
7	C.4.a.	BUMN	Kontributor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Governance, Risk and Control BUMN</li> <li>- Analisis kinerja keuangan, operasional dan fiskal BUMN</li> <li>- Analisis atas tingkat kompetitif, efisiensi dan transparansi BUMN pada industri masing-masing</li> <li>- Kontribusi BUMN terhadap pembangunan (kinerja pelaksanaan penugasan pemerintah)</li> <li>- Peran BUMN pada kontribusi fiskal negara/daerah</li> <li>- Analisis going concern BUMN</li> <li>- Indikasi fraud di BUMN</li> <li>- Akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan aset</li> <li>- Permasalahan dan hambatan BUMN dalam pelaksanakan bisnis</li> <li>- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</li> </ul>	-	-	√	-

NO	KODE TOPIK	SEKTOR/TEMA/TOPIK PENGAWASAN	PERAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
8	D.1.c.	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin Non KUR)	Kontributor	- Ketepatan kebijakan Kredit Non KUR dan Kredit Lainnya (BUMN dibawah KemenBUMN) - Tata kelola basis data penerima (verifikasi pendaftar, pengujian duplikasi, dll) selaku KPA SB/SM Non KUR KemenBUMN - Akuntabilitas penyaluran termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dst.)	-	√	-	√
9	F.1.b.	SPIP	Kontributor	- Simpulan atas kondisi penyelenggaraan pengendalian intern pada instansi pemerintah pusat (a.l. SPIP, pengendalian/manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan) - Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintah pusat dan daerah - Analisis efektivitas penyelenggaraan SPIP dalam mendorong peningkatan kinerja K/L/D	-	-	-	√
10	F.1.c.	Kapabilitas APIP	Kontributor	- Simpulan atas kapabilitas APIP pusat dan daerah - Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kapabilitas APIP pusat dan daerah - Analisis efektivitas penyelenggaraan peran APIP K/L/D dalam mendorong ketercapaian tujuan organisasi	-	-	-	√
11	G.1.b	PILAR II-Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran	Kontributor	Analisis atas Keberadaan, Kecukupan dan Kememadaian upaya Mendorong pelibatan sektor non- pemerintah dan swasta dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim (KemenBUMN) termasuk Permasalahan/Hambatan Utama dan Rekomendasinya	√	-	-	-

Deputi Kepala BPKP,



Sally Salamah

NIP. 19670420 198703 2 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Direktur,



Arif Ardiyanto

NIP. 19661019 198703 1 001